



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 411/XI/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR  
13/I/TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Tana Toraja yang terarah, terpadu, terprogram dan sesuai prioritas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 298/VII/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan rancangan peraturan bupati dari perangkat daerah yang belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, sehingga Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 298/VII/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 13/I/Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI TANA TORAJA,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
3. Direktur RSUD Lakipadada di Makale;
4. Para Kepala Bagian Lingkup Setda di Tempat.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 411/XI/ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR  
 13/I/TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
 TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	INSTANSI TERKAIT	KET
			BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, bagi hasil pajak dan retribusi dari APBD Kabupaten Tana Toraja kepada lembang Tahun Anggaran 2025	Mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
2	Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, tunjangan pemerintah lembang dan BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, THR, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2025	Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
3	Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur terkait Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD	√	-	Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023	BPKPD	
4	RKPD Tahun 2026	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
5	Perubahan RKPD Tahun 2025	a. Pendahuluan b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Trw. II c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	-	√	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
6	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba	Badan Kesbangpol, BNNK Kab. Tana Toraja	



7	Rencana Aksi Penanggulangan Tuber Colosis di Kabupaten Tana Toraja	Mengatur Rencana Aksi Penanggulangan Tuber Colosis di Kabupaten Tana Toraja	√	-	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC	Dinas Kesehatan	
8	Pemeliharaan Eliminasi Malaria	Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria	√	-	Keputusan Menteri kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia	Dinas Kesehatan	
9	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah	BPKPD	
10	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembebasan Retribusi Persetujuan bangunan Gedung	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintahan Daerah	BPKPD	
11	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025	Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD, Bag. Organisasi , BKIPSDM	
12	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Mengatur Terkait Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
13	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
14	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	Mengatur Terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
15	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
16	Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah	
17	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah, BPKPD	
		- Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian			- Peraturan Daerah Kabupaten tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah		
18	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2026	√	-	- Pemendagri No 90 Tahun 2019 - Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022 - Pemendagri No. 77 Tahun 2020 - Pemendagri No. 84 Tahun 2022	BPKPD	



19	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Labkesda	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
20	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Puskesmas	√	-	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	Dinas Kesehatan, dan Bagian Ortala	
21	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Persampahan	√	-	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023	DLH dan Bagian Ortala	
22	Kelas Jabatan	Penyusunan Kelas Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	√	-	Permen PAN dan RB No. 39 Tahun 2013	Bagian Ortala	
23	Pakaian Dinas	Penyusunan Aturan tentang Jenis Pakaian Dinas serta Atribut Pakaian Dinas Bagi ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024	Bagian Ortala	
24	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	-	√	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
25	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	
26	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan TA 2025	Perubahan Standar Perjalanan Dinas Dalam daerah	-	√	Perpres 33 Tahun 2020	BPKPD	
27	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik	√	-	Permen PAN dan RB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	DMPTSP	
28	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	√	-	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag	
29	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sangalla' pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	√	-	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, dan Bagian Ortala	
30	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pangan	√	-	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Ortala	
31	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah	√	-	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	Bapelitbangda	
32	Pola Tata Kelola BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Pola Tata Kelola BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	Dinas Kesehatan	



33	Rencana Strategis BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Rencana Strategis BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	Dinas Kesehatan	
34	Standar Pelayanan Minimal BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	Dinas Kesehatan	
35	Pengelolaan Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	BPMPD, Dinas Kesehatan	
36	Remunerasi BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Remunerasi BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	Dinas Kesehatan	
37	Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD	√	-	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	Dinas Kesehatan	
38	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla'	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
39	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Utara	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Utara	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
40	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Selatan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Sanggalla' Selatan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
41	Peta Batas Lembang Lea Kecamatan Makale	Peta Batas Lembang Lea Kecamatan Makale	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
42	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale Selatan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Makale Selatan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
43	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mengkendek	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mengkendek	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
44	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Gandangbatu Sillanan	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Gandangbatu Sillanan	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
45	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rantetayo	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
46	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Kurra	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
47	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rembon	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	

48	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong Balepe'	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Malimbong Balepe'	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
49	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Saluputti	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
50	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bittuang	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
51	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Masanda	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
52	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Rano	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
53	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bonggakaradeng	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Bonggakaradeng	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
54	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Simbuang	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	
55	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak	Peta Batas Lembang Dalam Kecamatan Mappak	√	-	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPML	

